

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

Magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada praktisi untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di luar kampus selama beberapa bulan. Program ini memberikan fleksibilitas kepada praktisi untuk terjun langsung pada dunia kerja dan mengonversi pengalaman tersebut menjadi SKS (Satuan Kredit Semester), sehingga praktisi tetap bisa memenuhi kewajiban akademiknya sekaligus mengikuti magang.

Sebagai praktisi PR dalam mengambil Divisi Humas Satuan Satgas Anti Hoaks merupakan pengalaman berharga sebagai praktisi jurusan Public Retalion (PR) dalam mengelola komunikasi publik, terutama yang berkaitan dengan isu hoaks dan disinformasi, peran yang sangat strategis dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan (hoaks) di era digital.

Hoaks yang tersebar melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat menyebabkan keresahan, memanipulasi opini publik, serta merusak persatuan dan kesatuan Masyarakat. Oleh karena itu, Satgas Anti Hoaks dibentuk untuk menangani dan mengurangi dampak negative dari hoaks yang dapat merugikan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satgas Anti Hoaks memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Masyarakat yang lebih kritis, terinformasi dengan baik, dan bebas dari hoaks yang merugikan. Selain itu, pengalaman ini juga membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dan literasi media yang sangat berguna dalam dunia profesionalitas dimasa depan. Penyebaran berita hoaks di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak, terutama menjelang pemilihan umum.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023, terdapat lebih dari 12.500 kasus hoaks yang teridentifikasi. Salah satu kategori hoaks yang paling banyak beredar di Indonesia adalah isu Kesehatan, dengan lebih dari 2.300

kasus yang dilaporkan. Selain itu hoaks terkait pemerintahan dan penipuan juga mencatat angka yang signifikan.

**W. Lawrence Neuman (2011): *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Edisi ke-7)*** – Buku ini membahas berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, memberikan panduan tentang bagaimana melakukan dan menganalisis studi komunikasi.

Menjelang pemilu 2024, hoaks politik menjadi sorotan utama, lebih dari 1.600 kasus yang teridentifikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa informasi palsu sering kali digunakan untuk memanipulasi persepsi Masyarakat terhadap calon atau partai politik tertentu.

Tren penyebaran hoaks menunjukkan peningkatan yang mencolok selama pemilu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat serta kurangnya literasi digital di kalangan Masyarakat. Banyak orang masih kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak, sehingga mereka rentan terhadap pengaruh berita palsu. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi digital menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks, kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan Masyarakat sangat diperlukan. Upaya seperti pembentukan satuan satgas anti hoaks oleh Kemenkominfo dan inisiatif dari organisasi sipil dapat membantu mengurangi dampak negatif dari informasi palsu ini. Dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, diharapkan penyebaran hoaks dapat diminimalisir, sehingga proses demokrasi di Indonesia tetap sehat dan transparan.

Sebagai praktisi PR magang di Divisi Humas Satgas Anti Hoaks, salah satu tugas utama yang diemban adalah penyaringan informasi yang beredar di media sosial, situs berita, atau aplikasi pesan instan. Penyebaran hoaks dan informasi palsu menjadi tantangan besar di era digital saat ini, dan praktisi yang sedang mengemban sebagai praktisi PR diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam menganalisis dan memeriksa kebenaran informasi tersebut. Penyaringan informasi dimulai dengan keterampilan untuk membedakan mana informasi yang valid dan mana yang meragukan, untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat membahayakan Masyarakat.

Dengan ini, Satuan Satgas Anti Hoaks Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam Upaya memberantas penyebaran berita di Indonesia. Melalui sinergi ini, PWI dan Kemenkominfo berusaha untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap hoaks yang beredar di Masyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama antara Satgas Anti Hoaks dan Kemenkominfo yaitu pendeteksi informasi hoaks melalui mesin yang bernama AIS (Automatic Identification System). Mesin tersebut menggunakan teknologi AI (Artificial Intelligence). Mesin seharga 200 miliar yang dapat mendeteksi konten hoaks, situs judi, hingga situs porno.

Dalam pembelajaran PR praktisi yang magang di divisi Satgas Anti Hoaks dilatih untuk memeriksa apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan terverifikasi. Misalnya, mereka akan memeriksa apakah informasi tersebut datang dari media massa yang sudah memiliki reputasi baik atau dari akun anonym yang tidak jelas asal-usulnya. Memahami kredibilitas sumber adalah Langkah awal yang penting sebelum informasi tersebut diproses lebih lanjut. Selain memeriksa sumber, praktisi juga dilatih untuk menganalisis konten secara mendalam. Konten yang disebar di media sosial sering kali disertai judul sensasional atau gambar yang menarik perhatian. Namun, terkadang gambar atau judul ini tidak relevan dengan informasi sesungguhnya.

Praktisi di Divisi Satgas Anti Hoaks akan belajar untuk melakukan cross-checking terhadap gambar atau video yang dipakai dalam informasi, serta mengonfirmasi apakah gambar tersebut telah di edit atau diambil dari konteks yang berbeda. Dalam proses menganalisis konteks dibalik informasi yang beredar. Terkadang, informasi yang benar bisa menjadi menyesatkan jika tidak dilihat dalam konteks yang tepat. Praktisi di Satgas Anti Hoaks diajarkan untuk memahami apakah informasi tersebut sesuai dengan waktu, tempat, dan peristiwa yang sedang terjadi.

Memahami konteks secara menyeluruh memungkinkan praktisi untuk mengidentifikasi apakah informasi tersebut sengaja dipelintir untuk menciptakan persepsi yang salah atau menyebarkan kebingungan di kalangan publik. Mereka juga memahami bahwa hoaks sering kali dimaksudkan untuk memperburuk ketegangan sosial, politik, atau ekonomi, yang mengharuskan mereka untuk selalu waspada terhadap Teknik manipulative tersebut.

Praktisi yang berpartisipasi di Divisi Humas Satgas Anti Hoaks juga dilatih untuk mengajak Masyarakat berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi. Mereka tidak hanya memverifikasi informasi secara pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam mengedukasi orang lain untuk lebih teliti dalam memilih sumber informasi. Praktisi diajarkan untuk mengembangkan konten edukatif, seperti artikel, video, atau infografis, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi.

Sebagai bagian dari analisis strategi ini, praktisi juga bekerja untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye. Media sosial merupakan platform yang paling cepat menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah. Praktisi yang magang di Divisi Humas terlibat dalam merancang kampanye anti-hoaks yang kreatif dan menarik, dengan tujuan untuk mencapai audience yang lebih luas. **Patricia Parsons (2008): *Ethics in Public Relations: A Guide to Best Practice*** – Buku ini memberikan panduan komprehensif tentang pertimbangan etika dalam bidang hubungan masyarakat. Buku ini menguraikan praktik terbaik dan peran etika dalam pengambilan keputusan PR.

Melalui kampanye penyuluhan yang dilakukan oleh Divisi Humas Satgas Anti Hoaks, praktisi magang juga dituntut mempraktikkan keahlian PR untuk belajar untuk mengangkat studi kasus atau testimoni nyata dari korban hoaks. Menggunakan cerita nyata yang dapat membantu Masyarakat lebih memahami betapa merugikannya penyebaran hoaks. Praktisi magang berperan dalam Menyusun konten yang memperlihatkan dampak dari hoaks dan bagaimana hal itu bisa merusak kehidupan seseorang, serta menambah ketegangan sosial. Dengan pendekatan ini, Masyarakat diharapkan lebih sadar akan bahaya hoaks dan menjadi lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Strategi peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam memerangi hoaks juga penting. Praktisi magang dilatih untuk mengajak Masyarakat untuk ikut serta dalam proses verifikasi informasi. Hal ini termasuk mendorong orang-orang sekitar mereka untuk lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan melaporkan konten yang meragukan. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya berpikir kritis.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Divisi Humas Satgas Anti Hoaks PWI sangat komprehensif, melibatkan berbagai elemen teknologi, kolaborasi, edukasi, serta penegakan hukum. Praktisi magang memiliki

kesempatan untuk berperan aktif dalam setiap aspek strategi ini, belajar secara langsung tentang dinamika pemberantasan hoaks, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan analisis yang sangat berharga. Dengan keterlibatan mereka, diharapkan Masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan kritis dalam menerima informasi, serta semakin minim hoaks yang tersebar di Indonesia.

Dengan demikian, Divisi Humas Satgas Anti Hoaks Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan hoaks di Indonesia, dan praktisi PR yang berpartisipasi di divisi ini mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Melalui berbagai strategi yang melibatkan edukasi literasi digital, verifikasi fakta, penggunaan sosial media untuk kampanye anti-hoaks serta melakukan penyuluhan ke masyarakat maupun dilingkungan pendidikan. Mereka berkontribusi dalam menyaring informasi dan memberikan pengetahuan kepada Masyarakat luas.

**Jane Johnston (2013): *Media Relations: Issues and Strategies*** – Buku ini mengeksplorasi pendekatan strategis dalam membangun dan menjaga hubungan dengan media, serta tantangan dalam mengelola isu dan krisis dalam komunikasi media. Kerja sama yang erat antara PWI, Kemenkominfo, dan berbagai pihak lainnya memperkuat strategi yang diterapkan, sehingga pemberantasan hoaks dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, praktisi PR dapat memperluas jejaring profesional mereka melalui magang di Satgas Anti Hoaks PWI.

Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif bagi praktisi sebagai individu yang berkontribusi dalam memberantas hoaks, maupun bagi Masyarakat yang semakin sadar dan teredukasi untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak valid. Melalui strategi ini, praktisi PR dapat membangun citra positif dan menjaga reputasi organisasi. Selain itu, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ruang informasi yang lebih sehat, bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Profesi**

### **1.2.1. Maksud Kerja Profesi**

Kerja Profesi ini dilakukan dengan beberapa maksud, yaitu sebagai berikut.

1. Mendapatkan pengalaman praktis pada divisi humas, khususnya di Satuan Satgas Anti Hoaks Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan komunikasi

3. Meningkatkan pemahaman mengenai penyebaran berita hoaks khususnya di Indonesia
4. Dapat memberikan kontribusi terhadap Masyarakat luas khususnya dampak negatife informasi yang tidak valid

### **1.2.2. Tujuan Kerja Profesi**

Tujuan Kerja Profesi ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.

1. Mendapatkan pengalaman praktis pada divisi humas, khususnya di Satuan Satgas Anti Hoaks Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan komunikasi
3. Meningkatkan pemahaman mengenai penyebaran berita hoaks khususnya di Indonesia
4. Dapat memberikan kontribusi terhadap Masyarakat luas khususnya dampak negatife informasi yang tidak valid.

### **1.3. Tempat Kerja Profesi**

Tempat : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  
Alamat : Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih No. 34, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110  
Divisi : Humas

Tempat pelaksanaan Kerja Profesi yang berada di Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih No. 34, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

Alasan memilih melaksanakan Kerja Profesi di Satgas Anti Hoaks Persatuan Wartawan Indonesia, ingin lebih terlibat dalam pemberantasan hoaks, sebuah masalah besar era digital saat ini. Selain itu memilih Satgas Anti Hoaks memberikan pengalaman praktis dalam penggunaan teknologi untuk memeriksa kebenaran informasi yang beredar. Pada praktik ini akan belajar cara menggunakan berbagai alat untuk memastikan apakah informasi yang disebar valid atau tidak.



